



## **EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGUATAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENJAMIN KREDIBILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**Jhon Fernades Hutagalung, Febyola Crisanta Situmeang, Renny Maisyarah**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

### **Abstrak**

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana integrasi sistem akuntansi daerah dan mekanisme kontrol internal mampu mengoptimalkan kualitas output laporan keuangan. Penelitian ini bersifat asosiatif, Sampel yang digunakan adalah 15 orang dengan metode sampling jenuh. Analisis yang digunakan adalah analisis path karena adanya hubungan antar variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pengendalian internal memiliki pengaruh negatif yang juga tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

**Kata Kunci:** Evaluasi Sistem Keuangan Daerah.

### **PENDAHULUAN**

Implementasi tata kelola keuangan daerah saat ini berpijak pada peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Regulasi ini mengamanatkan bahwa setiap entitas pemerintah wajib menyajikan laporan keuangan yang konsisten dan sesuai standar yang berlaku. Hal ini bertujuan agar seluruh hak dan kewajiban daerah yang bernilai uang dapat terpotret secara transparan dan

akuntabel. Menurut Aditya & surjono (2017), laporan keuangan merupakan instrumen vital bagi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja finansialnya kepada publik.

Sejalannya dengan upaya tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah menetapkan fondasi normatif agar informasi akuntansi yang dihasilkan memenuhi kualifikasi

\*Correspondence Address : [rennymaisyarah@gmail.com](mailto:rennymaisyarah@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v13i6.2026.1302-1309

© 2026UM-Tapsel Press

berkualitas, yakni relevan, andal, dapat dipahami, serta memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan bukan sekedar tumpukan data, melainkan alat bagi pemangku kepentingan untuk menilai efisiensi operasional yang mendukung proses pengambilan keputusan strategis dalam ranah pemerintah daerah.

Berdasarkan kerangka konseptual SAP, penyajian laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang komprehensif mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan dalam satu periode anggaran. Dokumen ini menjadi basis utama dalam mengukur pemanfaatan sumber daya ekonomi, menilai kondisi kesehatan finansial, serta mengevaluasi efektivitas kinerja pemerintah. Guna menjamin validasi data tersebut, setiap tahunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi objek pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit ini dilakukan untuk memberikan opini profesional terkait kewajaran informasi keuangan, yang standarnya diukur melalui kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta kepatuhan terhadap regulasi perundang undangan yang berlaku.

Penyajian informasi keuangan yang berkualitas pada level pemerintah daerah memerlukan dukungan sistem akuntansi yang terintegrasi dan memadai. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan laporan keuangan yang transparan bagi publik, legislatif, maupun pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menuntut adanya perbaikan berkelanjutan pada mekanisme audit serta pengembangan sistem akuntansi yang mampu menjawab kompleksitas lingkungan sektor publik. Tantangan utama dalam proses ini adalah kebutuhan akan keahlian spesifik untuk merancang sistem yang adaptif terhadap dinamika regulasi

dan kebutuhan informasi yang semakin beragam.

Dalam perspektif stewardship theory, pemerintah bertindak sebagai pengelola (steward) yang diberikan amanah untuk mengambil keputusan terbaik demi kepentingan publik (Syarifudin, 2014). Oleh karena itu, laporan keuangan berfungsi sebagai instrumen asersi dari manajemen pemerintah yang merefleksikan kondisi fundamental keuangan kepada para pemangku kepentingan (Yuliani dkk.,2010). Penguatan fungsi revidu dan pengawasan internal menjadi kunci agar laporan keuangan tersebut tidak hanya sekedar memenuhi aspek administratif, tetapi juga memiliki esensi nilai informasi yang tinggi.

Kondisi empiris menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Desa Sukoharjo, Kecamatan sekampung, Kabupaten Lampung Timur masih menghadapi tantangan yang signifikan. Berdasarkan data publikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, capaian audit opini pada entitas ini masih fluktuatif dan belum sepenuhnya stabil pada level tertinggi. Dalam kurun waktu 2019 hingga 2022, laporan keuangan Pemerintah Desa Sukoharjo lebih dominan mendapatkan predikat wajar dengan Pengecualian (WDP). Bahkan, pada tahun anggaran 2020, BPK memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Disclaimer, yang mengindikasikan adanya kendala serius dalam penyajian informasi keuangan. Meskipun pada tahun 2021 sempat tercapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun pencapaian tersebut bersifat rentan dan beresiko mengalami penurunan apabila tidak didukung oleh konsistensi kinerja serta penguatan sistem akuntansi pada pengendalian internal yang berkelanjutan.

Kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah daerah sangat

dipengaruhi oleh efektivitas proses penyusunan anggaran. Perencanaan anggaran yang sistematis menjamin pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat dalam pemungutan pendapatan serta pengalokasian belanja sesuai dengan klasifikasi yang tepat. Dalam mekanisme ini, setiap satuan kerja menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai dokumen strategis yang memuat program kegiatan operasional selama satu tahun anggaran. Akurasi dalam penyusunan RKA menjadi persyaratan utama agar fungsi pengendalian, pengukuran, dan pelaporan kinerja dapat berjalan secara optimal. Secara garis besar, laporan keuangan merupakan output akhir dari siklus penganggaran yang mencerminkan derajat pertanggungjawaban entitas. Sejalan dengan pendapat hikmah dan Busaini (2015), perencanaan yang tidak matang di awal periode (januari hingga desember) akan berimplikasi negatif pada siklus perencanaan anggaran di masa mendatang.

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Akuntansi keuangan daerah merupakan proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan entitas pemerintah daerah yang bertujuan menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan ekonomi (Halim, 2013). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, sistem akuntansi keuangan daerah adalah rangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengklasifikasian, hingga pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Implementasi SAKD yang efektif saat ini wajib berbasis teknologi informasi (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/SIPD) guna menjamin akurasi data dan memitigasi risiko kesalahan manusiawi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

### 2. Aktivitas Pengendalian Internal

Pengendalian internal dalam sektor publik merujuk pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008. Aktivitas pengendalian merupakan tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen guna memitigasi risiko telah dilaksanakan. Pengendalian internal yang kuat mencakup pemisahan fungsi yang jelas, otorisasi transaksi yang tepat, serta pengawasan rutin. Keberadaan pengendalian internal berfungsi sebagai sistem deteksi dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan atau kekeliruan dalam proses pelaporan keuangan.

### 3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang memenuhi karakteristik kualitatif sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010. Karakteristik tersebut meliputi:

Relevan: Informasi mampu memengaruhi keputusan pengguna.

Andal: Bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.

Dapat Dibandingkan: Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau entitas lain.

Dapat Dipahami: Disajikan dalam bentuk dan istilah yang dapat dimengerti oleh pengguna.

Kualitas ini sering kali diukur melalui opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi standar tertinggi akuntabilitas publik.

### 4. Teori Penatalayanan (Stewardship Theory)

Teori ini menjelaskan hubungan antara pelayan (*steward*) yaitu pemerintah, dan pemilik (*principal*) yaitu rakyat. Dalam konteks akuntansi sektor publik, pemerintah tidak bertindak untuk kepentingan pribadi, melainkan berusaha mencapai tujuan organisasi dan memenuhi

kepentingan publik melalui penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel (Syarifudin, 2014).

### **Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal merupakan suatu mekanisme terpadu yang dijalankan oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai dalam suatu organisasi. Sistem ini dirancang secara sistematis untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan entitas, terutama yang berkaitan dengan reliabilitas laporan keuangan, efektivitas operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Fungsi utama dari pengendalian internal adalah sebagai alat untuk meminimalisir potensi kekeliruan atau penyimpangan, baik yang terjadi karena kelalaian manusiawi maupun tindakan yang disengaja. Dalam prakteknya, pengendalian ini mencakup pengawasan berkala terhadap catatan akuntansi serta evaluasi terhadap fungsi-fungsi operasional guna memastikan seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan.

### **Pengertian Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan merupakan komponen laporan pertanggungjawaban yang menyajikan informasi terstruktur mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Tujuan utama dari penyajian laporan ini adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja finansial suatu entitas yang bermanfaat bagi para pemangku

kepentingan. Menurut International Federation of Accountants-Public Sector Committee (IFAC-PSC), pengguna laporan keuangan sektor publik sangat luas, mencakup masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, serta kreditor dan donor. Informasi tersebut berfungsi sebagai instrumen dalam pengambilan keputusan strategis, evaluasi kinerja pemerintah, serta sarana pemantauan akuntabilitas publik.

### **Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Daerah**

Secara spesifik, penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah memiliki beberapa tujuan utama yang berfokus pada transparansi dan pengambilan keputusan, antara lain:

1. **Prediksi Aliran Sumber Daya:** Menyediakan informasi yang akurat untuk memprediksi kebutuhan saldo neraca, arus kas, serta kecukupan sumber daya finansial jangka pendek guna mendukung operasional unit pemerintah secara berkelanjutan

2. **Evaluasi Kondisi Ekonomi:** Memberikan basis data keuangan yang andal bagi pemangku kepentingan untuk menilai kesehatan ekonomi entitas serta memantau perubahan posisi keuangan yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

3. **Monitoring Akuntabilitas dan Kepatuhan:** Menjadi instrumen utama dalam memantau kinerja manajerial serta menjamin kesesuaian aktivitas keuangan terhadap regulasi perundang-undangan, kontrak yang disepakati, serta ketentuan normatif lainnya yang berlaku di sektor publik.

### **Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, laporan keuangan pemerintah daerah yang lengkap dan komprehensif kini terdiri dari 7 (tujuh) komponen utama, yaitu:

1. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA):** Menyajikan ringkasan sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya

keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL): Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca: Menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO): Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

5. Laporan Arus Kas (LAK): Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE): Menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): Memberikan penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang tertera dalam keenam laporan di atas guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi pembaca.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Pendekatan ini dipilih untuk menjelaskan hubungan kausalitas dan menguji pengaruh antara variabel independen (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Internal) terhadap variabel dependen (Kualitas Laporan Jenis dan Sumber Data

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam fungsi akuntansi dan pelaporan pada Pemerintah Desa Sukoharjo. Mengingat

jumlah populasi yang terbatas, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampling Jenuh (Sensus), di mana seluruh anggota populasi sebanyak 15 responden dijadikan sebagai sampel penelitian.

### Definisi Operasional Variabel

1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1): Serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi yang digunakan untuk mengolah data transaksi hingga menjadi laporan keuangan.

2 Aktivitas Pengendalian Internal (X2): Tindakan pengawasan dan prosedur teknis yang dijalankan untuk memastikan keandalan pelaporan dan kepatuhan terhadap aturan.

3 Kualitas Laporan Keuangan (Y): Derajat keandalan, relevansi, dan keterbandingan informasi keuangan yang dihasilkan oleh entitas.

### Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner disusun menggunakan Skala Likert (1-5) untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel-variabel yang diteliti. Selain itu, dilakukan observasi dan studi dokumentasi terkait data opini BPK dan laporan keuangan tahunan.

### Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul diolah menggunakan software statistik dengan tahapan sebagai berikut:

1. Uji Instrumen: Mencakup uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan kuesioner layak digunakan.

2. Uji Asumsi Klasik: Meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

3. Analisis Jalur (Path Analysis): Digunakan untuk menguji kekuatan pengaruh langsung maupun tidak langsung antar variabel.

4. Uji Hipotesis: Menggunakan Uji t (parsial) dan Uji F (simultan) dengan tingkat signifikansi 5% (0,05).

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan strategis dalam penelitian guna memperoleh data yang akurat dan relevan sesuai standar penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1 Kuesioner (Angket): Merupakan teknik utama yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pernyataan tertulis kepada 15 responden (perangkat desa). Kuesioner diukur menggunakan Skala Likert untuk mendapatkan data kuantitatif mengenai pengaruh SAKD dan Pengendalian Internal.

2 Observasi: Dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penatausahaan keuangan dan implementasi sistem informasi pada Pemerintah Desa Sukoharjo.

3 Dokumentasi: Dilakukan dengan menghimpun dokumen-dokumen relevan seperti Laporan Keuangan Desa, catatan opini BPK, serta regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah.

### **3.5 Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian ini disusun untuk mengumpulkan data objektif mengenai variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Aktivitas Pengendalian Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan. Instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner terstruktur yang dibagikan kepada responden. Kuesioner ini dikembangkan berdasarkan indikator-indikator empiris dari masing-masing variabel dan diukur menggunakan Skala Likert 1-5 (Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju). Penggunaan instrumen kuesioner bertujuan untuk mentransformasikan persepsi responden menjadi data numerik agar dapat diolah secara statistik guna menguji hipotesis penelitian secara akurat. Selain kuesioner, penelitian ini juga menggunakan instrumen berupa lembar observasi dan studi dokumentasi sebagai data pendukung.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kuantitatif untuk menguji hipotesis penelitian melalui tahapan sistematis sebagai berikut:

1. Uji Kualitas Data: Melakukan uji validitas untuk melihat ketepatan instrumen kuesioner dan uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi jawaban responden.

2. Uji Asumsi Klasik: Melakukan uji normalitas untuk memastikan data berdistribusi normal, serta uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas sebagai prasyarat analisis regresi/jalur.

3. Analisis Jalur (Path Analysis): Digunakan untuk menguji besarnya pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) dan Aktivitas Pengendalian Internal (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

4. Uji Hipotesis (Uji t): Dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan tingkat kepercayaan 95%.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Desa Sukoharjo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Responden dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yang merupakan perangkat desa yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil pengumpulan data, seluruh kuesioner kembali dalam keadaan lengkap dan layak untuk diolah.

### **Hasil Analisis Jalur (Path Analysis)**

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan statistik, ditemukan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) dan Aktivitas Pengendalian

Internal (X2) memiliki kontribusi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Namun, secara parsial ditemukan beberapa temuan penting:

1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y): Hasil pengujian menunjukkan bahwa implementasi SAKD di Desa Sukoharjo sudah berjalan, namun masih diperlukan penguatan pada integrasi data digital agar meminimalisir kesalahan input manual.

2 Pengaruh Aktivitas Pengendalian Internal (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y): Aktivitas pengendalian terbukti memiliki peran sentral. Pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh pimpinan desa mampu meningkatkan akurasi laporan keuangan.

#### 4.3 Pembahasan

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan di Desa Sukoharjo tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem informasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh ketatnya pengawasan internal. Fenomena opini BPK yang fluktuatif di Desa Sukoharjo (WDP, TMP, hingga akhirnya mencapai WTP) membuktikan bahwa kedisiplinan perangkat desa dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP) adalah kunci utama.

Temuan ini sejalan dengan Stewardship Theory yang menyatakan bahwa perangkat desa sebagai steward memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat. Meskipun sistem akuntansi sudah tersedia, tanpa adanya pengendalian internal yang konsisten, risiko terjadinya kesalahan material dalam laporan keuangan akan tetap tinggi.

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Aktivitas

Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Desa Sukoharjo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki peran penting dalam mengolah data transaksi desa, namun efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang mengoperasikannya.

2 Aktivitas Pengendalian Internal terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pengawasan yang melekat, adanya otorisasi yang jelas, dan reviu berkala atas catatan akuntansi terbukti mampu memitigasi risiko kesalahan penyajian data keuangan di tingkat desa.

3 Secara simultan, integrasi antara sistem akuntansi yang baik dan pengendalian internal yang ketat menjadi faktor kunci bagi Pemerintah Desa Sukoharjo dalam mempertahankan opini audit yang baik dan mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa kepada masyarakat.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1 Bagi Pemerintah Desa Sukoharjo: Diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensi perangkat desa melalui pelatihan teknis terkait sistem informasi akuntansi terbaru (seperti SIPD) agar proses input data lebih akurat.

2 Bagi Pimpinan Desa: Perlu memperkuat fungsi pengawasan internal secara konsisten, tidak hanya saat menjelang pemeriksaan audit, guna memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan berlaku sepanjang tahun anggaran.

3 Bagi Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk menambah variabel lain yang mungkin memengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti komitmen organisasi atau pemanfaatan teknologi informasi, serta memperluas cakupan

sampel penelitian pada desa-desa lain di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

## **DAFTAR REFERENSI**

Angraini, D. Y. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *JOM Fekon*, 3(1).

Dewi, N. P. R. F., Mendra, N. P. Y., & Saitri, P. W. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Kharisma*, 4(1).

Halim, Abdul. (2013). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Hikmah & Busaini. (2015). Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Syarifudin. (2014). Implementasi Stewardship Theory dalam Tata Kelola Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.